

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Data

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten / Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta yang terdiri atas 4 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta, yang menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah selama tahun 2008-2013.

B. Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif data digunakan untuk mengetahui data dari variabel-variabel yang diteliti yang ditunjukkan dalam tabel Deskripsi Statistik, di mana di dalamnya menunjukkan angka minimum, maksimum, rata-rata dan standard deviasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat kekayaan daerah (X_1), tingkat ketergantungan (X_2), total asset (X_3), rasio PAD (X_4), Belanja daerah (X_5), jumlah penduduk (X_6), jumlah SKPD (X_7), jumlah temuan (X_8), dan tingkat penyimpangan (X_9) serta tingkat pengungkapan (Y). Hasil deskriptif statistik variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	30	838431	3229149	1587465.33	585081.955
X2	30	.72	.93	.8458	.06801
X3	30	21.77	29.09	28.0600	1.32084
X4	30	.04	.27	.1168	.06382
X5	30	27.12	28.30	27.6547	.28643
X6	30	385937	1118358	693720.30	284890.499
X7	30	14	57	34.10	12.680
X8	30	1	4	1.97	.928
X9	30	.00032	3.35368	.5316	.95936
Y	30	.67	.85	.7964	.06157
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Data Sekunder Diolah

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa selama periode observasi (2008-2013) diperoleh nilai minimum tingkat pengungkapan (Y) sebesar 0,67 yaitu kabupaten Gunungkidul, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,85 diperoleh kabupaten Kulonprogo. Variabel tingkat kekayaan daerah (X₁), selama periode observasi mempunyai nilai minimum sebesar 838.431 yang diperoleh kabupaten Sleman, sedangkan maksimum sebesar 3.229.149 yang diperoleh kotamadya Yogyakarta.

Variabel tingkat ketergantungan (X₂), selama periode observasi mempunyai nilai minimum sebesar 0,72 yaitu daerah kabupaten Bantul, sedangkan tingkat ketergantungan terbesar diperoleh kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 0,93. Variabel total asset (X₃), selama periode observasi mempunyai nilai minimum sebesar 21,77 yang diperoleh daerah kabupaten

Sleman, sedangkan total asset terbesar diperoleh kotamadya Yogyakarta yaitu sebesar 29,09.

Variabel rasio PAD (X_4) minimum sebesar 0,04 yang diperoleh kabupaten Gunungkidul, sedangkan daerah yang memiliki rasio PAD terbesar adalah daerah kotamadya Yogyakarta yaitu sebesar 0,27. Variabel belanja daerah (X_5) mempunyai nilai minimum sebesar 27,12 yang diperoleh daerah kabupaten Kulonprogo, sedangkan daerah yang mempunyai belanja daerah terbesar adalah kabupaten Sleman dengan jumlah 28,30.

Jumlah penduduk (X_6) yang paling sedikit adalah daerah kabupaten Kulonprogo pada tahun 2008 dengan jumlah sebanyak 385.937 jiwa, sedangkan daerah yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak adalah daerah kabupaten Sleman pada tahun 2012 dengan jumlah sebanyak 1.118.358 jiwa. Daerah kabupaten yang mempunyai SKPD (X_7) paling sedikit adalah kabupaten Bantul pada tahun 2008 dengan jumlah SKPD sebanyak 14 unit satua kerja, sedangkan daerah yang mempunyai SKPD terbanyak adalah daerah kotamadya Yogyakarta pada tahun 2013 dengan jumlah SKPD sebanyak 57 unit satuan kerja.

Jumlah temuan audit (X_8) yang dilakukan BPK paling sedikit diperoleh daerah kabupaten Gunungkidul (tahun 2008-2009) dan Sleman, sedangkan temuan audit yang paling banyak adalah di daerah kabupaten Bantul dan Gunungkidul pada tahun 2011. Pemerintah daerah yang paling kecil melakukan penyimpangan (X_9) adalah daerah kabupaten Bantul pada tahun 2013 dengan jumlah penyimpangan sebesar 0,00032, sedangkan daerah yang

mempunyai penyimpangan terbanyak adalah daerah kotamadya Yogyakarta pada tahun 2008 dengan jumlah penyimpangan sebesar 3,35368.

C. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi terhadap model penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi:

1. Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik *kolmogorov-smirnov*. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2
Uji Normalitas

Nilai K-S	Nilai Sig	Keterangan
0,787	0,566	Berdistribusi normal

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai sig sebesar $0,566 > 0,05$. Hal ini berarti dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi data yang normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujiannya dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4.3
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig.	Keterangan
Tingkat kekayaan daerah (X_1)	0,315	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tingkat ketergantungan (X_2)	0,717	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Total asset (X_3)	0,198	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig.	Keterangan
Rasio PAD (X_4)	0,976	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Belanja daerah (X_5)	0,434	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Jumlah Penduduk (X_6)	0,359	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Jumlah SKPD (X_7)	0,747	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Jumlah temuan (X_8)	0,962	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tingkat penyimpangan (X_9)	0,413	Tidak terjadi heteroskedastisitas

3. Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1.905 ^a

a. Predictors: (Constant), X_9 , X_1 , X_8 , X_3 , X_5 , X_2 , X_7 , X_4 , X_6

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Sekunder Diolah

Tabel 4.4 di atas menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,905. dengan $n = 30$ dan $K = 9$ diperoleh nilai $dL = 0,782$ dan $dU = 2,192$ maka nilai dw berada diantara $dL < dw < dU$ atau $0,782 < 1,905 < 2,192$ yang artinya tidak ada pengambilan keputusan.

4. Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas dengan menggunakan nilai VIF dan *tolerance* dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.009	112.445
	X2	.234	4.282
	X3	.869	1.151
	X4	.131	7.643
	X5	.012	84.955
	X6	.005	187.217
	X7	.145	6.902
	X8	.540	1.852
	X9	.733	1.364

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Sekunder Diolah

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa dalam variabel X1, X5 dan X6 mempunyai nilai VIF atau *Variance Inflation Faktor* > 10, dan nilai *tolerance* > 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Untuk mengatasinya maka salah satu variabel tersebut dikeluarkan dari model, yaitu variabel yang mempunyai nilai VIF tertinggi (X₆). Hasil pengujian multikolinieritas setelah pengurangan salah satu variabel.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.303	3.304
	X2	.269	3.724
	X3	.894	1.118
	X4	.131	7.605
	X5	.328	3.049
	X7	.150	6.647
	X8	.576	1.736
	X9	.735	1.361

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Sekunder Diolah

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai VIF atau *Variance Inflation Faktor* < 10 , dan nilai *tolerance* $> 0,1$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

D. Pengujian Hipotesis

1. Interpretasi Analisis Regresi Linier

Hasil pengujian analisis regresi linier dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7
Analisis Regresi Linier

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.750	1.600		1.719	.100
	X1	.121	.053	.687	2.299	.032
	X2	-.128	.287	-.142	-.446	.660
	X3	-.005	.008	-.102	-.584	.566
	X4	.876	.438	.908	2.001	.058
	X5	-.120	.062	-.557	-1.939	.066
	X7	-.006	.002	-1.189	-2.803	.011
	X8	-.017	.014	-.262	-1.208	.241
	X9	.001	.012	.010	.054	.957

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data sekunder diolah

Dari tabel 4.7 di atas diperoleh nilai persamaan regresi linier sebagai berikut.

$$\text{DISC} = 2,750 + 0,121\text{WEALTH} - 0,128\text{DEPEND} - 0,005\text{ASSET} + 0,876\text{PAD} - 0,120\text{BD} - 0,006\text{SKPD} - 0,017\text{FIND} + 0,001\text{DEV}$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

a. Konstanta = 2,750

Konstanta sebesar 2,750 menunjukkan bahwa apabila tingkat kekayaan daerah (X_1), tingkat ketergantungan (X_2), total asset (X_3), rasio PAD (X_4), Belanja daerah (X_5), jumlah SKPD (X_7), jumlah temuan (X_8), dan tingkat penyimpangan (X_9) sama dengan nol, maka tingkat pengungkapan LKPD akan sebesar 2,750.

- b. Koefisien regresi $b_1 = 0,121$

Koefisien regresi yang positif sebesar 0,121 menunjukkan bahwa variabel jumlah kekayaan daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, artinya semakin banyak kekayaan suatu daerah, maka akan semakin luas tingkat pengungkapan LKPD.

- c. Koefisien regresi $b_2 = -0,128$

Koefisien regresi yang negatif sebesar 0,128 menunjukkan bahwa variabel tingkat ketergantungan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, artinya semakin tinggi ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat, maka semakin rendah tingkat pengungkapan LKPD..

- d. Koefisien regresi $b_3 = -0,005$

Koefisien regresi yang negatif sebesar 0,005 menunjukkan bahwa variabel jumlah asset pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, artinya semakin banyak jumlah asset yang dimiliki daerah, maka semakin rendah tingkat pengungkapan LKPD.

- e. Koefisien regresi $b_4 = 0,876$

Koefisien regresi yang positif sebesar 0,876 menunjukkan bahwa variabel PAD mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, artinya semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin luas tingkat pengungkapan LKPD.

- f. Koefisien regresi $b_5 = -0,120$

Koefisien regresi yang negatif sebesar 0,120 menunjukkan bahwa variabel belanja daerah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, artinya semakin tinggi belanja daerah, maka semakin rendah tingkat pengungkapan LKPD.

- g. Koefisien regresi $b_7 = -0,006$

Koefisien regresi yang negatif sebesar 0,006 menunjukkan bahwa variabel jumlah SKPD mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, artinya semakin banyak jumlah SKPD suatu daerah maka akan semakin rendah tingkat pengungkapan LKPD.

- h. Koefisien regresi $b_8 = -0,017$

Koefisien regresi yang negatif sebesar 0,017 menunjukkan bahwa variabel jumlah temuan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, artinya semakin banyak jumlah temuan maka akan semakin rendah tingkat pengungkapan LKPD.

- i. Koefisien regresi $b_9 = 0,001$

Koefisien regresi yang positif sebesar 0,001 menunjukkan bahwa variabel tingkat penyimpangan mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, artinya semakin banyak jumlah temuan di suatu daerah maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan LKPD.

2. Uji t

Berikut ini adalah hasil uji t masing-masing variabel independen terhadap variabel Y.

Tabel 4.8
Hasil Uji t

Variabel	Nilai Sig.	Keterangan
Tingkat kekayaan daerah (X_1)	0,032	H_1 diterima
Tingkat ketergantungan (X_2)	0,660	H_2 ditolak
Total asset (X_3)	0,566	H_3 ditolak
Rasio PAD (X_4)	0,058	H_4 ditolak
Belanja daerah (X_5)	0,066	H_5 ditolak
Jumlah SKPD (X_7)	0,011	H_7 ditolak
Jumlah temuan (X_8)	0,241	H_8 ditolak
Tingkat penyimpangan (X_9)	0,957	H_9 ditolak

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan tabel di atas, maka pengujian hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut.

a. Variabel tingkat kekayaan daerah

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,032. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% maka H_1 diterima atau tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

b. Variabel tingkat ketergantungan

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,660. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka

H_2 ditolak atau tingkat ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

c. Variabel total aset

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,566. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka H_3 ditolak atau total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

d. Variabel rasio PAD

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,058. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka H_4 ditolak atau rasio PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

e. Variabel belanja daerah

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,066. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka H_5 ditolak atau belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

f. Variabel jumlah SKPD

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,011. Karena nilai koefisien yang negatif dan signifikansi lebih kecil dari 5% maka H_7 ditolak atau jumlah SKPD berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

g. Variabel jumlah temuan

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,241. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka H_0 ditolak atau jumlah temuan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

h. Variabel tingkat penyimpangan

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,957. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka H_0 ditolak atau tingkat penyimpangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

3. Uji F

Hasil pengujian nilai F dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9
Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.047	8	.006	1.995	.098 ^a
	Residual	.062	21	.003		
	Total	.110	29			

a. Predictors: (Constant), X9, X1, X8, X3, X5, X2, X7, X4

b. Dependent Variable: Y

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 1,995 dengan nilai sig sebesar 0,098 lebih besar dari tingkat kepercayaan 0,05. Hal ini berarti secara simultan variable tingkat kekayaan daerah (X_1),

tingkat ketergantungan (X_2), total asset (X_3), rasio PAD (X_4), Belanja daerah (X_5), jumlah SKPD (X_7), jumlah temuan (X_8), dan tingkat penyimpangan (X_9) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD(Y).

4. Uji Koefisien Determinasi

Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.10
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.657 ^a	.432	.215	.05453

a. Predictors: (Constant), X9, X1, X8, X3, X5, X2, X7, X4

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *adjusted r square* sebesar 0,215. Hal ini berarti 21,5 % variasi variabel tingkat pengungkapan LKPD dipengaruhi oleh tingkat kekayaan daerah (X_1), tingkat ketergantungan (X_2), total asset (X_3), rasio PAD (X_4), Belanja daerah (X_5), jumlah SKPD (X_7), jumlah temuan (X_8), dan tingkat penyimpangan (X_9) sedangkan sisanya sebesar 78,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

E. Pembahasan

Berdasarkan analisis di atas, tidak semua hipotesis yang diajukan dapat didukung oleh data.

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan, terbukti. Ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,121 dan nilai sig sebesar $0,032 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Artinya, semakin banyak kekayaan yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin luas tingkat pengungkapan LKPD. Jumlah kekayaan yang dimiliki suatu daerah mencerminkan kinerja daerah tersebut. Daerah yang memiliki jumlah kekayaan yang banyak, mencerminkan kinerja yang baik, sedangkan daerah yang mempunyai jumlah kekayaan sedikit mencerminkan kinerja daerah tersebut tidak baik. Seperti yang diungkapkan oleh Chistiaens (1999) dalam Sinaga (2012) yang menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah berhubungan positif dengan meningkatnya pengungkapan karena memberikan sinyal dari kualitas kepemimpinan kepala daerah, di mana kepala daerah dapat mengambil manfaat dengan meningkatkan kesempatan untuk dipilih kembali dan mengurangi biaya kepentingan. Menurut Laswad (2005) dalam Rahman dkk (2013) menyebutkan bahwa kekayaan pemerintah mencerminkan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya. Ketika kinerjanya baik, maka tidak menjadi masalah bagi pemerintah untuk melaporkan informasi keuangannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hilmi dan Dwi

(2012); Rahman dkk (2013) yang membuktikan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan, tidak terbukti. Ditunjukkan oleh nilai sig sebesar $0,660 > 0,05$. Hal ini berarti tingkat ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Besarnya tingkat ketergantungan tidak memberikan pengaruh bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Yogyakarta. Tidak signifikannya pengaruh tingkat ketergantungan mungkin disebabkan dalam era desentralisasi saat ini, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah tidak terlalu erat sehingga tidak ada monitoring khusus pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Jika ada monitoring khusus tersebut digunakan dalam menentukan anggaran dana perimbangan di daerah sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hilmi dan Martani (2012) yang membuktikan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa total aset berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan, tidak terbukti. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig sebesar $0,566 > 0,05$, artinya besarnya total aset yang dimiliki daerah tidak memberikan pengaruh signifikan bagi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Tidak signifikannya pengaruh total aset terhadap tingkat pengungkapan LKPD kemungkinan disebabkan pemerintah daerah

yang memiliki jumlah aset yang besar cenderung memiliki kualitas pengelolaan aset yang kurang baik dan memperoleh catatan dari BPK (Hilmi dan Martani, 2012). Sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah yang diberi opini wajar dengan pengecualian mempunyai ketidakwajaran dalam hal aset sehingga dikecualikan (Rahman dkk, 2013). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hilmi dan Martan (2012); Rahman dkk (2013) dan Sinaga dan Prabowo (2011) serta Suhardjianto (2011) yang membuktikan bahwa total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa rasio PAD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan, tidak terbukti. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig sebesar $0,058 > 0,05$, artinya rasio PAD tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Tidak signifikannya rasio PAD terhadap tingkat pengungkapan dikarenakan daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi belum tentu akan melakukan pengungkapan informasi keuangan yang tinggi juga. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Puspita dan Martani (2012) yang membuktikan bahwa rasio PAD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan konten, presentasi pengungkapan dan total pengungkapan.

Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan, tidak terbukti. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig sebesar $0,066 > 0,05$, artinya belanja daerah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.

Tidak signifikannya belanja daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD menunjukkan bahwa pemda yang memiliki belanja tinggi tidak secara otomatis akan melaporkan informasi keuangannya. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 belanja daerah digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja yang tinggi tidak mencerminkan pelayanan yang tinggi, sehingga secara langsung tidak akan mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD.

Hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan, tidak terbukti. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar $-0,011$ dan nilai sig sebesar $0,01 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah SKPD berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, artinya semakin banyak jumlah SKPD maka akan semakin sedikit pengungkapan yang dilakukan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena kegiatan antar SKPD cenderung generik sehingga tidak membutuhkan pengungkapan yang lebih banyak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Khasanah (2014) yang membuktikan bahwa jumlah SKPD memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan.

Hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa jumlah temuan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan, tidak terbukti. Ditunjukkan oleh nilai sig sebesar $0,241 > 0,05$, artinya jumlah temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap akan mengungkapkan informasi

keuangannya, walaupun BPK akan memberikan catatan terhadap temuan audit, dengan asumsi catatan tersebut dapat diperbaiki. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hilmi dan Martani (2012) yang menemukan bahwa jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis kesembilan yang menyatakan bahwa tingkat penyimpangan berpengaruh negative terhadap tingkat pengungkapan, tidak terbukti. Ditunjukkan oleh nilai sig sebesar $0,957 > 0,05$, artinya tingkat penyimpangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa ada tidaknya penyimpangan, pemerintah daerah tetap mengungkapan informasi keuangan kepada public. Seandainya penyimpangan tersebut terjadi, pemerintah daerah tidak akan menutupi penyimpangan yang terjadi dengan mengurangi pengungkapan yang dilakukan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wulandari (2013) yang membuktikan bahwa tingkat penyimpangan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keuangan secara sukarela melalui website resmi pemerintah.